

**ANALISIS KESERASIAN PROGRAM LAYANAN
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE – PROVIDER (BDS-P)
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JAWA TIMUR**

Irfan Fatoni
Indah Dewi Nurhayati
irfanfatony@gmail.com
Universitas Widyagama Malang

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana keharmonisan antara layanan program yang dimiliki oleh BDS-P dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan terkait dengan pengembangan UKM di Jawa Timur. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah BDS-P (*Business Development Services Provider*) yang merupakan profesi yang menyediakan berbagai bentuk pelayanan atau jasa kepada klien yang terlibat dalam pengembangan bisnis. Sedangkan objek penelitian ini adalah layanan atau jasa yang disediakan oleh BDS-P kepada klien. Dalam penelitian ini HOQ matriks untuk memfasilitasi ukuran harmonis. Studi ini mengatakan bahwa, layanan program BDS-P di Korda Bojonegoro telah memiliki harmoni yang baik. Korda Surabaya membutuhkan upaya untuk meningkatkan kompatibilitas. Korda Madura telah mampu mencapai keselarasan penuh. Tingkat harmoni Korda Jember adalah salah satu yang terendah dibandingkan dengan kabel-kabel. Korda Malang memiliki tingkat tertinggi kompatibilitas dibandingkan dengan kabel lain. Korda Kediri menunjukkan bahwa harmoni dari BDS-P di kabel masih perlu ditingkatkan. Korda Madiun termasuk yang membutuhkan perhatian dibandingkan dengan tali lainnya.

Kata Kunci: BDS-P, Peraturan Pemerintah, UMKM

Abstract: *The aim of the study to analyze the extent to which the harmony between programming services owned by BDS-P with applicable government regulation and associated with the development of SMEs in East Java. Research subjects in this study were BDS-P (Business Development Services Provider) that is a profession that provides various forms of service/services to clients engaged in business development. While the object of this research is a service/services provided by BDS-P to the client. In this study HOQ matrix to facilitate the measure of harmony. The study says that, the program services of the BDS-P in Korda Bojonegoro has had a good harmony. Korda Surabaya require efforts to improve compatibility. Korda Madura has been able to achieve full harmony. Korda Jember harmony rate is among the lowest compared to other cord-cord. Korda Malang has the highest level of compatibility as compared to other cord. Korda Kediri showed that the harmony of the BDS-P in cord still needs to be improved. Korda Madiun including that need attention compared with other cords.*

Keywords: *Business Development Services–Provider, government policie, SME*

Lembaga Pelayanan Pengembangan Usaha (*Business Development Services Provider* (BDS-P) merupakan suatu usaha penyedia jasa pengembangan usaha kepada UMKM baik dari aspek finansial maupun non finansial. Dari aspek finansial, bentuk pelayanan yang diberikan oleh BDS-P hampir sama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang bertugas untuk memberikan konsultasi dan pendampingan UMKM agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank. Menurut Bank Indonesia (2008), peran BDS-P sebagai KKMB sangat dibutuhkan untuk membantu perbankan dalam menemukan calon nasabah UMKM baru yang produktif dan sektor usaha yang potensial untuk dibiayai perbankan. Sedangkan dari aspek non finansial, BDS-P berperan dalam membantu sektor UMKM untuk mengembangkan usaha, utamanya pada aspek informasi pasar, manajemen, serta pelatihan keterampilan khusus (baik manajerial maupun teknis/produk) dan konsultasi bisnis (Henry, 2006). Peran dari segi non finansial lainnya adalah bentuk pendampingan UMKM pada fase merintis usaha (*start-up*). Karena dalam fase ini, UMKM tidak hanya membutuhkan pendampingan dari segi finansial saja, tetapi juga dari segi non finansial (utamanya aspek operasional) dalam menjalankan bisnis.

Jika ditinjau dari sudut pandang pemerintah, maka pengembangan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan dari atas (Nurdin, 2003). Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang telah tertuang dalam peraturan baik pusat maupun daerah terkait pengembangan UMKM di Indonesia, maka BDS-P seyogyanya mampu menjalankan peran sesuai dengan peraturan yang ada. Namun peraturan-peraturan pemerintah tersebut masih tergolong peraturan yang belum lama ditetapkan, dan hasil studi lapangan menunjukkan bahwa belum adanya suatu penelitian yang meneliti tentang keterpaduan peranana BDS-P dengan peraturan-peraturan tersebut. Padahal peraturan yang telah dibuat tersebut memerlukan adanya evaluasi untuk melihat sejauh mana peran-peran pihak di luar pemerintah memiliki (sinkron) dalam menjalankannya. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk malakukan kajian tentang program-program layanan *Business Development Services-Provider* (BDS-P) dengan peraturan pemerintah terkait pengembangan UMKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana (keterpaduan/keharmonisan) antara program-program layanan yang dimiliki oleh BDS-P dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan terkait dengan pengembangan UMKM di Jawa Timur.

Business Development Services (BDS)

Business Development Services adalah suatu bentuk jasa/ layanan pengembangan bisnis. Di Indonesia, sektor ini telah mulai muncul sebagai suatu profesi yang menyediakan berbagai bentuk jasa/layanan kepada klien (umumnya adalah pelaku usaha/ UMKM) yang bergerak di bidang pengembangan bisnis. Adapun para penyedia layanan pengembangan bisnis ini biasa disebut dengan BDS-P (*Business Development Services Provider*). Dalam penelitian ini, BDS-P menjadi subjek yang diteliti utama dari penelitian untuk kemudian ingin diukur sejauh mana program-program layanan yang dimiliki/disediakan BDS-P memiliki dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

Peran BDS-P dalam Pengembangan UMKM

Dari beberapa definisi BDS-P di atas, maka sudah sepatutnya BDS-P mampu berperan serta secara aktif dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang dialami UMKM saat ini. Penelitian Urata (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia yang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Permasalahan Finansial:
 - a. Kurangnya fasilitas permodalan yang dapat diakses oleh UMKM
 - b. Tidak ada pendekatan yang sistematis terhadap proses permodalan usaha untuk UMKM
 - c. Tingginya biaya transaksi yang diakibatkan oleh prosedur pengajuan kredit yang masih tergolong rumit
 - d. Tingginya bunga permodalan baik investasi maupun modal kerja
 - e. Banyaknya UMKM yang belum memiliki standar pengelolaan keuangan yang baik (belum *bankable*)
2. Permasalahan Non Finansial:
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi, produksi dan pengendalian kualitas.
 - b. Kurangnya pengetahuan dan jaringan pemasaran.
 - c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia.
 - d. Kurangnya pemahaman tentang akuntansi dan keuangan.

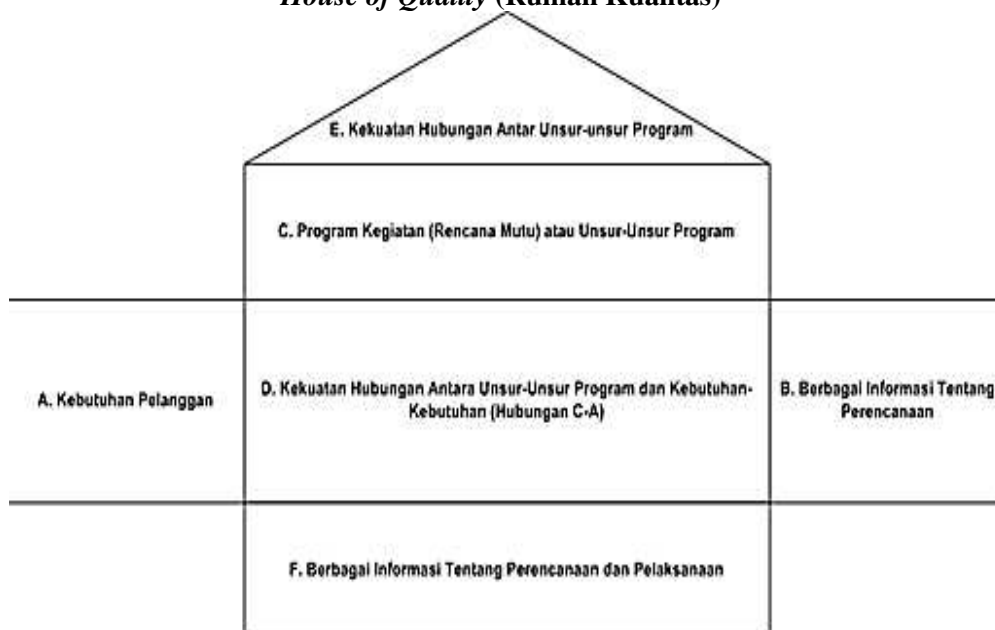
Tantangan dan Peluang Penelitian Tentang BDS-P

BDS-P hadir di tengah masyarakat sebagai suatu lembaga yang menyediakan layanan-layanan terkait pengembangan usaha, khususnya UMKM. Karena bagi UMKM, di era globalisasi saat ini memang tercipta berbagai kesempatan usaha dan peluang pasar, tetapi sekaligus juga menghadirkan tantangan dan ancaman baru yang jauh lebih besar dibanding masa sebelumnya (Iwantono, 2002). Diperlukan suatu langkah yang selaras dari seluruh pihak terkait pengembangan UMKM agar lebih memiliki daya saing. Nurdin (2003) menjelaskan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang pemerintah, maka pengembangan masyarakat merupakan hasil perencanaan dari atas. Oleh karena itulah, dalam konteks ini, hasil perencanaan pemerintah yang berupa undang-undang maupun peraturan lainnya terkait pengembangan UMKM juga harus dapat didukung oleh BDS-P sebagai salah satu dari elemen masyarakat yang wajib untuk berperan aktif.

Matriks *House of Quality* (HOQ)

Matriks HOQ merupakan salah satu komponen utama dalam metode *Quality Function Deployment* (QFD). Proses dalam QFD dilaksanakan dengan menyusun satu atau lebih matriks yang disebut HOQ. HOQ menerjemahkan keinginan konsumen menjadi spesifikasi produk yang dapat memuaskan konsumen. Pada dasarnya HOQ adalah rangkaian lembar-lembar matriks yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan (Tampubolon, 2001).

Gambar 1.
House of Quality (Rumah Kualitas)



Sumber: Tampubolon (2001)

Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan BDS-P telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut adalah ringkasannya.

Tabel 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Jenis Penelitian	Topik Bahasan			Metode	
			BDS-P	UMKM	Peraturan Pemerintah	Uji Hipotesis	Wawancara
1	Brijlal (2008)	Jurnal Internasional	✓	✓			✓
2	Mazanani dan Fatoki (2011)	Jurnal Internasional	✓	✓		✓	
3	Situmorang (2009)	Thesis	✓	✓		✓	
4	Tasrifin (2012)	Disertasi	✓			✓	
5	Fauzi (2013)	Tugas Akhir	✓		✓		✓

Sumber: Brijlal (2008), Mazanani dan Fatoki (2011), Situmorang (2009), Tasrifin (2012), Fauzi (2013).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analistis dengan metode studi kasus. Menurut M. Singarimbun dan Sofian Effendi (1993) penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas jasa/layanan yang diberikan oleh BDS-P kepada klien (umumnya adalah pelaku usaha/UMKM) yang bergerak di bidang pengembangan segala aspek bisnis dengan peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan usaha UMKM.

Subyek Penelitian

Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993: 862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah BDS-P (Business Development Services Provider) yaitu suatu profesi yang menyediakan berbagai bentuk jasa/layanan kepada klien yang bergerak di bidang pengembangan bisnis dan merupakan anggota Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) Korwil Jawa Timur. Adapun jumlah BDS-P tersebut sebanyak 58 lembaga. Masing-masing BDS-P memiliki staf atau konsultan yang jumlahnya berkisar antara 4-6 orang dan tersebar di 7 wilayah Koordinator Daerah (Korda) yaitu Korda Malang, Korda Jember, Korda Surabaya, Korda Kediri, Korda Madiun, Korda Bojonegoro, dan Korda Madura.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digali langsung dalam pelaksanaan penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah data yang telah di sediakan oleh pihak lain selain peneliti seperti Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM di Jawa Timur, Asosiasi Business Development Services (ABDSI) Korwil Jatim, dll. Berikut ini merupakan beberapa teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 2.
Jenis, Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

No	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1	Angket (<i>Quisttionaire</i>)	Angket, Daftar Cocok (<i>Check List</i>), Skala (<i>Scale</i>), Inventori (<i>Inventory</i>)
2	Wawancara (<i>Interview</i>)	Pedoman Wawancara (<i>Interview Guide</i>), Daftar Cocok (<i>Check List</i>)
3	Pengamatan (<i>Observasi</i>)	Lembar Pengamatan (<i>Observation Sheet</i>), Panduan Pengamatan (<i>Observation Schedule</i>), Daftar Cocok (<i>Check List</i>)
4	Tes	Soal Tes, Inventori (<i>Inventory</i>)
5	Dokumentasi	Daftar Cocok (<i>Check List</i>), Tabel

Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang relevan. Oleh karena itu, objek dalam penelitian ini jasa/layanan yang diberikan oleh BDS-P kepada klien (umumnya adalah pelaku usaha/UMKM) yang bergerak di bidang pengembangan segala aspek bisnis dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatakan usaha UMKM.

Lokasi penelitian

Sesuai dengan subyek dan obyek penelitian, maka penelitian ini dilakukan pada kantor-kantor BDS-P dalam memberikan layanan pemberdayaan usaha (umumnya dikantor Klinik K-UMKM) yang tersebar di kabupaten atau kota di Jawa Timur

Tahapan Penelitian dan Analisis Data

Pada tahap ini, dilakukan kajian reverensi yang relevan dengan judul penelitian. Aktivitas ini diperlukan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan peraturan-peraturan pemerintah yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).

Pada tahapan pengumpulan data diawali dengan melakukan pengumpulan seluruh informasi mengenai peraturan baik dari pusat maupun daerah yang terkait dengan bidang-bidang pengembangan UMKM yang melibatkan peran serta BDS-P sebagai penyedia layanan pengembangan usaha (UMKM). Setelah seluruh peraturan berhasil dikumpulkan, maka dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dan lebih mendalam terkait bidang-bidang pengembangan UMKM apa saja yang melibatkan BDS-P. Proses identifikasi bidang-bidang ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan tinjauan lapangan melalui wawancara dan diskusi dengan para narasumber di Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Setelah data terkait bidang-bidang pengembangan diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data dari para BDS-P yang diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai profil masing-masing BDS-P, program-program layanan yang dimiliki serta kemungkinan adanya temuan penelitian yang mendukung proses analisis ini.

Pada tahapan ini terlebih dahulu disusun suatu pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan untuk memandu peneliti dalam melakukan wawancara terstruktur kepada para narasumber yang digunakan. Setelah keseluruhan data BDS-P berhasil dikumpulkan, maka data-data tersebut diolah dengan melakukan modifikasi terhadap matriks HOQ untuk mempermudah dalam mengukur keserasian program layanan dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. Hasil pengolahan data ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan interpretasi data pada tahapan berikutnya.

Pada tahapan ini dilakukan analisis dan interpretasi dari data yang telah berhasil dikumpulkan dan diolah pada tahapan sebelumnya. Adapun analisis dan interpretasi ini diarahkan pada bagaimana program layanan dari masing-masing

BDS-P terhadap bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur dalam peraturan pemerintah terkait, baik peraturan dari pusat maupun daerah. Dalam konteks penelitian ini, program-program layanan BDS-P dapat dikatakan memiliki dengan peraturan pemerintah apabila program-program layanan BDS-P memiliki kesesuaian dengan bidang pengembangan yang ada. Semakin banyak penyediaan program layanan BDS-P yang sesuai dengan bidang pengembangan UMKM, maka semakin baik pula tingkatnya. Pada tahapan analisis ini, mula-mula analisis dilakukan terhadap peraturan pemerintah terkait pengembangan UMKM, kemudian analisis dilakukan pada setiap BDS-P yang diteliti untuk melihat sejauh mana keserasian masing-masing BDS-P yang diteliti.

Setelah dilakukan analisis dan interpretasi dari keseluruhan data yang telah diperoleh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan keserasian program layanan BDS-P terhadap bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Rekalpitulasi Keserasian Layanan Program BDS-P Dengan Peraturan Pemerintah

Kategori	Sub-kategori	Fasilitas		Sarana		Perawatan		Kebersihan		Keamanan		Kenyamanan		Kualitas		Total	Rata-rata	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Kategori 1	1a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1j	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1k	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kategori 2	2a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2b		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2c		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2d		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2e		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2f		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2g		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2h		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2i		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2j		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2k		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2l		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kategori 3	3a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3j	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3k	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Rata-rata	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Tabel 3, menunjukkan gambaran mengenai bagaimana keserasian yang telah dicapai oleh masing-masing BDS-P. Selain itu, dapat dilihat pula bagaimana keserasian yang telah tercapai di masing-masing korda yang ada. Pada bagian

paling kanan dari tabel, terdapat kolom total, kolom rata-rata dan kolom rata-rata per bidang. Kolom total tersebut menunjukkan seberapa banyak BDS-P yang telah selaras dengan sub bidang pengembangan tertentu (sesuai dengan baris dalam tabel). Sedangkan untuk kolom rata-rata, digunakan untuk menunjukkan persentase rata-rata pencapaian keserasian dari seluruh BDS-P untuk setiap sub bidang pengembangan UMKM. Dan untuk kolom rata-rata per bidang digunakan untuk menunjukkan persentase rata-rata pencapaian keserasian dari seluruh BDS-P dengan kelompok bidang pengembangan UMKM (lima bidang utama pengembangan UMKM).

Kemudian untuk bagian bawah tabel terdapat baris total, baris rata-rata dan baris rata-rata per korda. Baris total menunjukkan jumlah sub bidang pengembangan yang telah dicapai oleh masing-masing responden melalui program-program layanannya. Baris rata-rata menunjukkan persentase rata-rata pencapaian keserasian setiap BDS-P. Apabila BDS-P mampu mencapai keserasian pada 18 sub bidang pengembangan yang ada, maka persentasenya adalah 100%. Sedangkan untuk baris rata-rata per korda, digunakan untuk menunjukkan persentase pencapaian BDS-P pada masing-masing korda. Sehingga dari tabel rekapitulasi ini, proses analisis dan interpretasi data untuk mengetahui sejauh mana keserasian daripada program layanan BDS-P di Jawa Timur dengan bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur oleh pemerintah dapat dilakukan pada bab berikutnya.

Setelah analisis keserasian dilakukan pada masing-masing BDS-P yang diteliti, maka selanjutnya dilakukan analisis keserasian BDS-P yang dilihat dari sudut pandang masing-masing korda yang menaungi BDS-P tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan terkait baik atau kurangnya keserasian di masing-masing korda. Sehingga nantinya dapat dimunculkan rekomendasi untuk masing-masing korda maupun secara keseluruhan BDS-P di Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan keserasian dalam bidang pengembangan UMKM.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Bojonegoro

Korda Bojonegoro ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Bojonegoro, Lamongan dan Tuban. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada dua, yaitu BDSP101 dan BDSP102. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Bojonegoro telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan kedua BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Bojonegoro telah mampu mencapai keserasian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kedua BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan pemasaran.

c. Keresasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Bidang ini merupakan bidang yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan peningkatan keresasian di Korda Bojonegoro. Dari dua BDS-P yang ada di korda ini, BDSP101 hanya mampu selaras dengan satu dari empat sub bidang pengembangan desain dan teknologi. Sedangkan BDSP102 belum selaras dengan empat sub bidang yang ada.

d. Keresasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di korda ini belum melaksanakan keseluruhan sub bidang pengembangan yang ada. Perlu adanya peningkatan keresasian untuk sub bidang mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan serta sub bidang meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.

e. Keresasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, program layanan dari para BDS-P yang ada di Korda Bojonegoro ini telah memiliki keresasian yang baik pada bidang sumber daya manusia, pemasaran dan akses permodalan. Hanya saja perlu adanya peningkatan keresasian pada dua bidang lainnya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan program layanan terkait dengan bidang produksi dan pengolahan serta desain dan teknologi pada dua BDS-P yang ada. Walaupun BDSP101 telah mampu melayani salah satu sub bidang desain dan teknologi, terkait fasilitas informasi mengenai desain dan teknologi serta pengendalian mutu. Namun hal ini masih sangat kurang, melihat BDSP101 yang fokusnya sangat spesifik pada UMKM yang dimiliki oleh para kaum perempuan. Sehingga fokus pengembangan terkait dua bidang yang masih belum selaras tersebut perlu ditingkatkan pada korda ini. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pada korda ini untuk meningkatkan keresasiannya antara lain dengan memperluas program layanan dari dua BDS-P yang telah ada (BDSP101 dan BDSP102) tentunya dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para BDS-P di bidang tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan beberapa BDS-P baru yang ditempatkan pada korda ini untuk menjangkau lebih banyak UMKM, serta semakin meningkatkan keresasian program layanan dengan bidang pengembangan UMKM menurut peraturan pemerintah yang berlaku di Jawa Timur.

Analisis Keresasian BDS-P di Korda Surabaya

Korda Surabaya ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Jombang. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada empat, yaitu BDSP201, BDSP202, BDSP203 dan BDSP204. Hasil analisis keresasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keresasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Surabaya telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan keempat BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, dari empat BDS-P yang ada, terdapat satu BDS-P yang belum memenuhi sub bidang pemasaran secara menyeluruh, yaitu BDSP201. Hal ini dikarenakan BDSP201 tidak memiliki tenaga konsultan ahli dalam bidang pemasaran. Sedangkan untuk ketiga BDS-P lainnya di korda ini, telah mampu selaras secara menyeluruh dengan seluruh sub bidang pemasaran yang ada.

c. Keserasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Bidang ini merupakan bidang yang juga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Surabaya. Karena dari empat BDS-P di korda ini, hanya ada satu BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan. Selain itu, terdapat dua dari empat BDS-P dalam korda ini yang tidak selaras sama sekali dengan seluruh sub bidang desain dan teknologi.

d. Keserasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, hanya dua dari empat BDS-P di korda ini yang melaksanakan keseluruhan sub bidang pengembangan yang ada. Perlu adanya peningkatan keserasian di bidang ini

e. Keserasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, seluruh BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, Untuk para BDS-P di Korda Surabaya memerlukan upaya peningkatan keserasian yang diutamakan pada bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan. Mengingat dari korda ini hanya satu dari empat BDS-P yang mampu selaras secara penuh terhadap lima bidang pengembangan UMKM yang ada. Ketidakselarasan pada beberapa sub bidang dikarenakan belum adanya kebutuhan yang sangat mendesak oleh para UMKM binaan dari BDS-P masing-masing.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Madura

Korda Madura ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, yang meliputi seluruh Madura, seperti Sumenep, Bangkalan, Sampang dan lain-lain. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada dua, yaitu BDSP301 dan BDSP302. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Madura telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan kedua BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, kedua BDS-P dalam korda ini telah mampu selaras dengan seluruh sub bidang pengembangan pemasaran.

c. Keserasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Pada bidang ini, salah satu dari dua BDS-P di korda ini telah selaras secara keseluruhan pada sub bidang desain dan teknologi. Namun satu BDS-P lainnya memiliki keserasian yang cukup berbeda secara signifikan, karena hanya mampu selaras pada satu dari empat sub bidang pengembangan yang ada. Sehingga upaya peningkatan keserasian dapat dilakukan dengan saling memberikan dukungan dan arahan dari BDSP301 pada BDSP302 agar semakin baik keserasiannya.

d. Keserasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, sama halnya dengan bidang sebelumnya, di mana BDSP301 mampu selaras secara penuh pada bidang ini. Sedangkan BDSP302 justru memiliki tingkat keserasian yang sangat kurang, karena belum selaras secara keseluruhan pada bidang produksi dan pengolahan.

e. Keserasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, dari dua BDS-P yang menempati korda ini, BDSP301 telah mampu mencapai keserasian secara penuh dengan bidang pengembangan yang ada. Sedangkan BDSP302 masih belum selaras secara penuh karena masih kurangnya kompetensi pada beberapa bidang, khususnya bidang produksi dan pengolahan serta bidang desain dan teknologi. Oleh karenanya, BDS-P pada korda ini perlu saling mendukung dengan melakukan koordinasi terkait pengembangan kompetensi pada bidang-bidang yang belum terlayani. Sehingga UMKM yang berada di daerah Madura dapat dikembangkan lebih optimal. Selain itu, penambahan BDS-P baru pada korda ini juga dirasa perlu, mengingat jangkauan daerah Madura yang cukup luas dan jumlah UMKM yang tidak kalah banyaknya dengan korda-korda lain di Jawa Timur.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Jember

Korda Jember ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada empat, yaitu BDSP401, BDSP402, BDSP403 dan BDSP404. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Jember telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan keempat BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, terdapat dua dari empat BDS-P yang telah selaras secara keseluruhan pada sub bidang pemasaran. Sedangkan dua BDS-P lainnya belum mampu selaras secara penuh karena kurangnya kompetensi di bidang ini.

c. Keserasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Bidang ini merupakan bidang yang juga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Jember. Karena dari empat BDS-P di korda ini, hanya ada satu BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan.

d. Keserasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, sama halnya dengan bidang desain dan teknologi, perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Jember. Karena dari empat BDS-P di korda ini, hanya ada satu BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan.

e. Keserasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, Korda Jember ini termasuk yang terendah tingkat keserasiannya dibandingkan dengan korda-korda lainnya. Walaupun ada satu BDS-P yang tingkat keserasiannya sempurna, hal ini menjadi cukup tidak berimbang apabila dibandingkan dengan 3 BDS-P lainnya di korda ini. Faktor yang menyebabkan hal ini karena masih kurangnya kompetensi pada 3 BDS-P lain yang ada di korda ini. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi untuk saling mendukung dalam peningkatan kompetensi dari BDS-P yang masih belum memiliki keserasian yang baik. Utamanya pada BDSP 401 yang telah memiliki keserasian yang baik, agar dapat mengajarkan ilmu dan kompetensinya pada BDS-P yang lainnya. Selain itu, upaya penanggulangan juga dapat dilakukan dengan adanya kerja sama dalam pengembangan UMKM binaan masing-masing. Sehingga ketika salah satu UMKM binaan BDS-P memerlukan bidang pengembangan tertentu yang masih belum dapat dilayani oleh BDS-P tersebut, maka dapat dilakukan kerja sama dengan BDS-P yang memiliki kompetensi tersebut untuk melaksanakan pengembangan.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Malang

Korda Malang ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Malang, Pasuruan dan Probolinggo. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada empat, yaitu BDSP501, BDSP502, BDSP503, BDSP504, BDSP505, BDSP506, BDSP507, BDSP508, BDSP509, BDSP510 dan BDSP511. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Malang telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan keempat BDS-P yang berada pada korda ini mampu

melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Malang belum mampu mencapai keserasian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 dari 11 BDS-P yang masih belum selaras secara keseluruhan pada sub bidang pemasaran, yaitu BDSP505 dan BDSP508. Di mana kedua BDS-P tersebut perlu melakukan peningkatan keserasian pada sub bidang pengembangan pemasaran yang ada.

c. Keserasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Bidang ini merupakan bidang yang juga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Malang. Karena dari 11 BDS-P di korda ini, hanya ada 5 BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan.

d. Keserasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Bidang ini merupakan bidang yang juga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Malang. Karena dari 11 BDS-P di korda ini, hanya ada 5 BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan.

e. Keserasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, Korda Malang merupakan korda yang memiliki jumlah BDS-P yang paling banyak, yaitu 11 BDS-P. Perbedaan jumlah ini terlihat sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah BDS-P di korda-korda lainnya. Selain unggul dari jumlah BDS-P, korda ini juga memiliki rata-rata tingkat keserasian dari para BDS-P per korda yang paling tinggi dibandingkan dengan korda yang lain. Hal ini perlu menjadi contoh bagi para BDS-P dan korda yang lain. Adapun beberapa faktor pendukung dari hal-hal tersebut adalah karena tingkat kompetensi yang dimiliki oleh SDM dari BDS-P yang ada di Korda Malang ini dapat dikatakan telah cukup mumpuni untuk melayani beragam bidang pengembangan UMKM yang telah diatur. Selain itu didukung dengan jam terbang pembinaan UMKM yang lebih berpengalaman sehingga keserasian yang diperoleh dapat sebaik ini. Tentunya dengan kondisi ini, maka para BDS-P yang ada di Korda Malang perlu melakukan transfer knowledge pada para BDS-P di Korda lainnya agar pemerataan keserasian dapat segera tercapai. Selain itu, usulan-usulan pada korda lainnya terkait perlunya penambahan adanya BDS-P baru agar mampu menjangkau keseluruhan UMKM di korda tersebut dapat didukung oleh para BDS-P dari korda Malang ini. Sehingga diharapkan terjadi akselerasi kompetensi, dan pengembangan UMKM dapat semakin maju dan selaras dengan peraturan pemerintah.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Kediri

Korda Kediri ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung dan Nganjuk. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada lima, yaitu BDSP601, BDSP602,

BDSP603, BDSP604 dan BDSP605. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Kediri telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan keempat BDS-P yang berada pada korda ini mampu melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keserasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Kediri telah mampu mencapai keserasian secara keseluruhan.

c. Keserasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Bidang ini merupakan bidang yang juga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan keserasian di Korda Kediri. Karena dari lima BDS-P di korda ini, hanya ada satu BDS-P yang mampu selaras secara keseluruhan.

d. Keserasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, hanya dua dari lima BDS-P di korda ini yang melaksanakan keseluruhan sub bidang pengembangan yang ada. Perlu adanya peningkatan keserasian bidang ini.

e. Keserasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, di Korda Kediri ini terdapat 5 BDS-P yang memiliki tingkat keserasian beragam. Dari hasil olah data keserasian menunjukkan bahwa keserasian para BDS-P di korda ini masih perlu dilakukan peningkatan pemerataan keserasian. Dari lima BDS-P yang ada, hanya satu BDS-P saja yang memiliki tingkat keserasian sempurna yaitu memenuhi seluruh sub bidang pengembangan yang ada. Sedangkan empat BDS-P lainnya masih perlu meningkatkan keserasiannya. Salah satu upaya peningkatan keserasian pada korda ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antar BDS-P, utamanya pada BDSP603 yang diharapkan dapat memberi arahan untuk menerapkan program layanan yang lebih selaras dengan bidang pengembangan UMKM.

Analisis Keserasian BDS-P di Korda Madiun

Korda Madiun ini melingkupi beberapa daerah operasional pengembangan UMKM, antara lain Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Sedangkan untuk BDS-P yang bertugas dalam korda ini ada dua, yaitu BDSP701 dan BDSP702. Hasil analisis keserasian BDS-P pada korda ini adalah sebagai berikut:

a. Keserasian Pada Bidang Sumber Daya Manusia

Pada bidang ini, keseluruhan BDS-P di Korda Madiun telah mampu selaras. Hal ini dikarenakan kedua BDS-P yang berada pada korda ini mampu

melaksanakan beragam bentuk program layanan yang sesuai dengan bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. Keresasian Pada Bidang Pemasaran

Pada bidang ini, BDSP701 belum mampu selaras dengan seluruh sub bidang pengembangan, dikarenakan bukan termasuk fokus pengembangan yang dijalankan oleh BDS-P-nya. Sedangkan BDSP702 telah mampu selaras secara keseluruhan pada seluruh sub bidang pengembangan yang ada.

c. Keresasian Pada Bidang Desain dan Teknologi

Pada bidang ini, BDSP701 belum mampu selaras dengan seluruh sub bidang pengembangan, dikarenakan bukan termasuk fokus pengembangan yang dijalankan oleh BDS-P-nya. Sedangkan BDSP702 telah mampu selaras secara keseluruhan pada seluruh sub bidang pengembangan yang ada.

d. Keresasian Pada Bidang Produksi dan Pengolahan

Pada bidang ini, BDSP701 belum mampu selaras dengan seluruh sub bidang pengembangan, dikarenakan bukan termasuk fokus pengembangan yang dijalankan oleh BDS-P-nya. Sedangkan BDSP702 telah mampu selaras secara keseluruhan pada seluruh sub bidang pengembangan yang ada.

e. Keresasian Pada Bidang Akses Permodalan

Pada bidang ini, kedua BDS-P di korda ini telah mampu selaras dengan melaksanakan seluruh program layanan yang sesuai dengan empat sub bidang pengembangan terkait akses permodalan.

Secara umum, tingkat keserasian BDS-P pada Korda Madiun ini juga termasuk yang perlu mendapat perhatian dibandingkan dengan korda lainnya. Hal ini dikarenakan hanya ada 2 BDS-P pada korda ini. Di mana BDSP702 telah mampu mencapai keserasian sempurna, sedangkan BDSP701 masih belum selaras dengan beberapa bidang pengembangan. BDSP701 memiliki tingkat keserasian yang kurang karena fokus yang dijalankan oleh BDS-P ini yang hanya melingkupi bidang pengembangan sumber daya manusia dan akses permodalan. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya bidang-bidang layanan pengembangan yang dapat diterima oleh UMKM di daerah tersebut. Walaupun ada BDSP702 yang sudah sangat baik keserasiannya, melihat jangkauan daerah yang luas, maka dirasa perlu adanya solusi terhadap masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, korda ini perlu adanya koordinasi yang lebih ditingkatkan. Di mana BDSP702 yang telah selaras dengan baik perlu mendukung peningkatan keserasian dari BDSP701. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan penambahan BDS-P baru untuk menjangkau UMKM binaan yang lebih banyak, dan tentunya dengan bidang-bidang pengembangan yang masih belum terlaksanakan oleh BDSP701.

SIMPULAN

Secara umum, program layanan dari para BDS-P yang ada di Korda Bojonegoro ini telah memiliki keserasian yang baik pada bidang sumber daya manusia, pemasaran dan akses permodalan. Hanya saja perlu adanya peningkatan keserasian pada dua

bidang lainnya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan program layanan terkait dengan bidang produksi dan pengolahan serta desain dan teknologi pada dua BDS-P yang ada.

Secara umum, untuk para BDS-P di Korda Surabaya memerlukan upaya peningkatan keserasian yang diutamakan pada bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan. Mengingat dari korda ini hanya satu dari empat BDS-P yang mampu selaras secara penuh terhadap lima bidang pengembangan UMKM yang ada. Ketidaksielarasan pada beberapa sub bidang dikarenakan belum adanya kebutuhan yang sangat mendesak oleh para UMKM binaan dari BDS-P masing-masing.

Secara umum, Korda Madura, dari dua BDS-P yang menempati korda ini, BDSP301 telah mampu mencapai keserasian secara penuh dengan bidang pengembangan yang ada. Sedangkan BDSP302 masih belum selaras secara penuh karena masih kurangnya kompetensi pada beberapa bidang, khususnya bidang produksi dan pengolahan serta bidang desain dan teknologi. Oleh karenanya, BDS-P pada korda ini perlu saling mendukung dengan melakukan koordinasi terkait pengembangan kompetensi pada bidang-bidang yang belum terlayani.

Secara umum, Korda Jember ini termasuk yang terendah tingkat keserasiannya dibandingkan dengan korda-korda lainnya. Walaupun ada satu BDS-P yang tingkat keserasiannya sempurna, hal ini menjadi cukup tidak berimbang apabila dibandingkan dengan 3 BDS-P lainnya di korda ini. Faktor yang menyebabkan hal ini karena masih kurangnya kompetensi pada 3 BDS -P lain yang ada di korda ini. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi untuk saling mendukung dalam peningkatan kompetensi dari BDS-P yang masih belum memiliki keserasian yang baik.

Secara umum, Korda Malang merupakan korda yang memiliki jumlah BDS-P yang paling banyak, yaitu 11 BDS-P. Perbedaan jumlah ini terlihat sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah BDS-P di korda-korda lainnya. Selain unggul dari jumlah BDS-P, korda ini juga memiliki rata-rata tingkat keselerasan dari para BDS-P per korda yang paling tinggi dibandingkan dengan korda yang lain. Hal ini perlu menjadi contoh bagi para BDS-P dan korda yang lain.

Secara umum, di Korda Kediri ini terdapat 5 BDS-P yang memiliki tingkat keserasian beragam. Dari hasil olah data keserasian menunjukkan bahwa keserasian para BDS-P di korda ini masih perlu dilakukan peningkatan pemerataan keserasian. Dari lima BDS-P yang ada, hanya satu BDS-P saja yang memiliki tingkat keserasian sempurna yaitu memenuhi seluruh sub bidang pengembangan yang ada. Sedangkan empat BDS-P lainnya masih perlu meningkatkan keserasiannya.

Secara umum, tingkat keserasian BDS-P pada Korda Madiun ini juga termasuk yang perlu mendapat perhatian dibandingkan dengan korda lainnya. Hal ini dikarenakan hanya ada 2 BDS-P pada korda ini. Di mana BDSP702 telah mampu mencapai keserasian sempurna, sedangkan BDSP701 masih belum selaras dengan beberapa bidang pengembangan. BDSP701 memiliki tingkat keserasian yang kurang karena fokus yang dijalankan oleh BDS-P ini yang hanya melingkupi bidang pengembangan sumber daya manusia dan akses permodalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik, 2005, Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=35¬ab=2 (diakses pada 5 Februari 2013).
- Bank Indonesia. (2008). Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). [Online] <http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Konsultasi+Usaha/KKMB/> (diakses pada 6 Desember 2012).
- Brijlal, Pradeep, (2008), Business Development Service: Addressing the Gap In The Western Cape, South Africa. *International Business & Economics Research Journal*, 7(9), 49-56.
- Cohen, Lou, 1995, *Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You*, Addison-Wesley.
- Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, (2001), *Business Development Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention*. [Online] Dapat diakses di: www.enterprisedevelopment.org/download.aspx?id=163 (diakses pada 6 Desember 2012).
- Henry, Susan, (2006), *Good Practice in Business Development Services: How Do We Enhance Entrepreneurial Skills in MFI Clients?*, Alterna Savings, Toronto.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial-Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua)*, Erlangga, Jakarta.
- Iwantono, Sutrisno, 2002, *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Dapat diakses di: http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/DR.%20Ir.%20Sutrisno%20I, wantono.htm (diakses pada 6 Desember 2012).
- Kementrian Koperasi dan UKM, 2012, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2011*, Jakarta.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 261 / KPTS / 013 / 2008 tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur, (2008), JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Mazanai, Musara dan Fatoki, Olawale, (2011), The Effectiveness of Business Development Services Providers (BDS) in Improving Access to Debt Finance by Start-Up SMEs in South Africa, *International Journal of Economics and Finance*. Vol.3, No.4.
- Nurdin, Muhammad Fadhil, (2003), *Prospek Sentra Bisnis UKM Dalam Era Perdagangan Bebas: Bidang Sosial Politik*. Dapat diakses di: http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2023/fadhil.9.htm (diakses pada 6 Desember 2012).

- Organisation For Economic Co-Operation And Development, (1995), *Boosting Businesses: Advisory Services*, Paris.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2011), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) Untuk Pengembangan.
- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2008), Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- Situmorang, Rohana, (2009) Pengaruh Peran Business Development Services (BDS) Terhadap Pendapatan Pengusaha Pertenunan di Kota Pematang Siantar, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soetrisno, Noer, (2002), *Strategi Penguatan UKM Melalui Pendekatan Kluster Bisnis: Konsep, Pengalaman Empiris dan Harapan*, Lutfansah Mediatama, Jakarta.
- Sulaeman, Suhendar, (2006), *Layanan Fasilitasi Pembiayaan Bagi Pengembangan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Dapat diakses di: http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/lplpb.htm (diakses pada 6 Desember 2012).
- Tambunan, Tulus, (2008), *SME Development, Economic Growth, and Government Intervention in Developing Country: The Indonesian Story*, International Journal of Entrepreneurship, Springer Science.
- Tampubolon, Daulat, 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (2008), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Urata, Shujiro, 2000, *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia*, JICAReport, Jakarta.